
**PENGARUH BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL SDA TERHADAP
PDRB SUMATERA UTARA**

Darmayuda, Ufira Isbah, dan Eka Armas Pailis

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan di Medan Penelitian ini dilaksanakan di Medan dimulai dari bulan Oktober-November 2008. Penelitian dilakukan untuk melihat efektifitas penggunaan dana perimbangan dalam hal ini dana bagi hasil pajak dan SDA.

Penelitian menggunakan data Panel kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam kurun waktu 2002-2006. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh dana perimbangan terhadap PDRB Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary least Square dengan common intercept.

Dari olahan data didapat hasil sebagai berikut, Bagi hasil pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Sumatera. Sementara itu bagi hasil Sumber Daya Alam tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian diketahui abahwa fokus pada penerimaan daerah sangat penting bagi pembangunan, namun jauh lebih penting fokus pada pengeluaran, mengedepankan efisensi, efektifitas dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka Pemda diberikan kewenangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya. Keseriusan untuk mendorong Pemda dalam menggali PAD ditunjukkan dengan telah direvisinya UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya berupa PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah porsi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur untuk lebih menghasilkan formulasi yang menguntungkan bagi daerah. Hal ini teraplikasi dari dana bagi hasil antara pusat dan daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil

sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus diharapkan dapat menjadi bentuk keadilan keuangan bagi sebahagian daerah-daerah yang selama sebelum era reformasi terkesan terzolimi. Dana perimbangan ini juga diharapkan dapat menstimulus perekonomian daerah untuk dapat berkembang dan maju yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerah penerima.

Dana perimbangan sebagai stimulus bagi perekonomian daerah dan kemakmuran masyarakat, maka sangat erat kaitannya dengan total kemampuan masyarakat suatu daerah untuk dapat memproduksi barang dan jasa di daerah atau lebih dikenal dengan produk domestik regional bruto. PDRB dapat dijadikan salah satu indikator bagi kemajuan perekonomian daerah, tingkat aktivitas ekonomi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Masalah selanjutnya adalah apakah dana perimbangan yang di berikan, terutama bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil SDA dapat benar-benar membantu bagi peningkatan ekonomi daerah dalam hal ini PDRB. Sehingga dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi serta masalah, kendala dan tantangan yang dapat mengurangi manfaat dana perimbangan bagi kemajuan ekonomi daerah.

Studi ini ditujukan untuk mengetahui implikasi komposisi penerimaan pemerintah daerah dalam hal ini dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Sumatera Utara. Studi ini diharapkan dapat menambah kajian empiris mengenai implikasi kebijakan fiskal pemerintah daerah terhadap perekonomian daerah.

Rumusan Masalah

Rumusan pokok permasalahan sebagai berikut. :

- Berapa besar pengaruh bagi hasil pajak terhadap PDRB kabupaten kota
- Berapa besar pengaruh bagi hasil SDA terhadap PDRB Kabupaten kota

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA terhadap PDRB Kabupaten/ kota di Sumatera Utara.

Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- Masukan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sumatera Utara dalam mengelola dana perimbangan bagi kepentingan ekonomi daerah
- Sebagai referensi bagi studi-studi selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi

Secara harfiah kata desentralisasi adalah lawan dari kata sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan (adjective) berkaitan dengan suatu kewenangan (authority) pemerintahan. Desentralisasi mengenai kewenangan pemerintahan menyangkut berbagai aspek misalnya bidang politik, urusan pemerintahan, sosial dan pembangunan ekonomi dan aspek fiskal. Dengan demikian lalu ada beberapa konsep seperti yang disampaikan mahfud siddik dalam Elmi, 2002 :

- Administrative decentralization
- Political decentralization
- Economic or market decentralization
- Fiscal decenralization

Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu “pilar” dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian masyarakat di daerah. Desentralisasi fiskal tersebut dikelompokkan pada ; (Elmi, 2002)

Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk. Sumber-sumber pendapatan potensial tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah.

Dua pendekatan yang secara umum dapat digunakan untuk menentukan besarnya pengeluaran pemerintah dalam bentuk dana pembangunan daerah, adalah :

- a. **Pendekatan Incrementalism**, yang didasarkan pada perubahan satu unit atau lebih variabel yang bersifat umum seperti jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka besarnya alokasi dana untuk tiap kegiatan yang sudah tertentu akan meningkat dari besar alokasi semula.
- b. **Pendekatan line-item budget**, yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang telah ada, meskipun keberadaan pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002)

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, peraturan daerah dan juga uu tentang pajak daerah, akan berkaitan erat dengan terjadinya investasi di daerah. Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka peningkatan aktivitas perekonomian yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto. Perda-perda

dan undang-undang yang tidak ramah terhadap investor dapat menyebabkan lambatnya investasi yang terjadi di daerah

Hasil penelitian Purwoko dari badan kebijakan fiskal, menunjukkan bahwa dari lima aspek yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi, ada satu aspek, yaitu aspek infrastruktur yang menunjukkan bahwa menurut persepsi para investor, infrastruktur merupakan aspek yang penting dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi kinerja aparat Pemda masih kurang baik, sehingga masih perlu ditingkatkan.

Proporsi GDP terhadap pajak langsung pada negara sedang berkembang lebih rendah daripada pajak langsung pada negara-negara maju. Hal ini dikarenakan pada negara-negara yang sedang berkembang lebih rendah golongan berpenghasilan tingginya. Dalam perkembangan akan terjadi proses pergeseran dari dominasi pajak tidak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi dengan peningkatan pendapatan perkapita penduduknya.

Studi Rappaport (1999) meneliti empat kelompok fakta-fakta empiris dari pertumbuhan ekonomi antardaerah (lokal) di Amerika Serikat. Dari estimasi-estimasi tersebut adalah: *pertama* adalah bahwa dari tahun 1970 sampai 1990, pertumbuhan ekonomi lokal berkorelasi negatif dengan besaran keuangan pemerintah lokal; *kedua*, pertumbuhan ekonomi lokal sepanjang periode yang diamati berkorelasi positif dengan pengeluaran pemerintah lokal untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah; *ketiga*, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 1970 sampai 1990 berkorelasi negatif dengan pajak pendapat personal lokal; *keempat*, pertumbuhan ekonomi daerah berkorelasi negatif dengan pajak penjualan tertentu yang diambil oleh pemerintah lokal.

Studi Aschauer (2000), menggunakan data 46 negara pendapatan rendah dan menengah dengan periode waktu 1970-1990. Dalam hal ini, beban pajak sehubungan dengan pengakumulasi modal publik dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif tersebut misalnya melalui pajak yang secara berlebihan dibebankan kepada sektor swasta sehingga pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Brata A.G (2004) dari Universitas Atmajaya Jogjakarta, menunjukkan bahwa, penerimaan pemerintah daerah dari sektor bukan pajak, terutama penerimaan sumber daya alam tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB daerah penerima. Hal ini secara umum memberikan indikasi bahwa penerimaan yang berkaitan dengan minyak dan gas (migas) tidak memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan dapat dikatakan sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa hasil-hasil sektor minyak dan gas sebagian besar mengalir ke pusat sementara pada akhirnya tidak ada kaitan yang kuat antara besarnya produksi migas di suatu propinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam hal APBD menjadi input pembangunan di daerah, maka pemerintah harus dapat lebih berpikir tentang *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* dari *input* yang

diberikan. Pemerintah daerah harus dapat dengan baik membuat perencanaan setiap pengeluaran yang dilakukan. Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan pelayanan dan fasilitas publik yang baik. Pemerintah juga harus dapat dengan jelas menetapkan target-target dan sasaran yang ingin dicapai dalam setiap pengeluaran, sehingga menjadi lebih akuntabel dan mudah dievaluasi.

Dalam hal *output*, maka input yang digunakan harus benar-benar menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan input yang diberikan. Dari segi *outcome* juga harus dapat terlihat hal-hal yang baik yang dapat timbul akibat dari *output* yang telah terjadi, target pencapaian harus dapat diukur dengan baik. Dalam hal *benefit*, harus dapat dijamin bahwa output yang terjadi benar-benar secara riil bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Dari segi *impact*, harus dapat dijamin bahwa pembangunan benar-benar memberikan dampak negative yang paling kecil bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi sebaliknya, memberikan dampak positif dan baik yang besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Kajian terhadap keuntungan dan kerugian serta dampaknya terhadap sosial masyarakat dan lingkungan juga harus menjadi prioritas yang penting dalam rangka pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak mereduksi kepentingan masyarakat juga kepentingan lingkungan. Pembangunan juga bukan hanya saja pada kuantitas yang memperlihatkan angka-angka, namun juga pada kualitas pembangunan yang tercermin dari sikap dan pola pikir masyarakat, keseimbangan lingkungan yang lebih baik dan lebih maju yang menjamin terjadinya *sustainable development*

Akhirnya dapat dikatakan bahwa, target untuk memperbesar penerimaan daerah memang sangat penting, tapi bertindak pada efisiensi dan efektifitas terhadap pengeluaran yang dilakukan jauh lebih penting demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan teori-teori ekonomi dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

- Bagi hasil pajak berpengaruh terhadap PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara
- Bagi hasil SDA berpengaruh terhadap PDRB kabupaten/kota Sumatera Utara

Variabel Penelitian

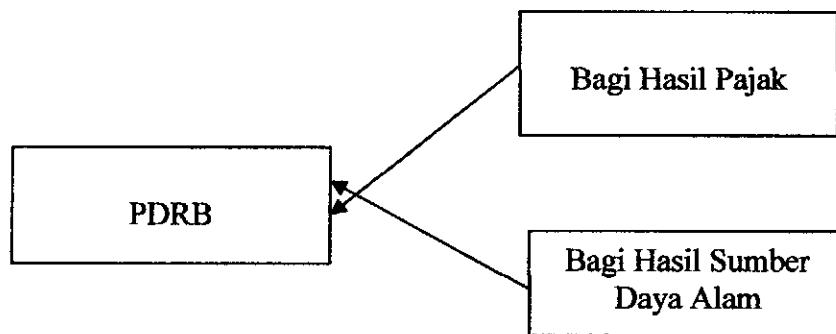
Adapun variabel penelitian dalam tulisan ini terdiri dari 1 (satu) variabel dependen dan 2 (dua) variabel independen.

Variabel dependent :
Produk Domestik Regional Brut

Variabel independen :

1. Bagi hasil Pajak
2. Bagi Hasil SDA

Kerangka Konsep



METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Medan dimulai dari bulan Oktober-November 2008. Penelitian dilakukan untuk melihat efektifitas penggunaan dana perimbangan dalam hal ini dana bagi hasil pajak dan SDA selama periode penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari publikasi-publikasi resmi, Badan Pusat Statistik, Buku APBD Departemen Keuangan beberapa tahun.

Defenisi operasional

Untuk meragamkan persepsi dalam penulisan ini, maka disajikan beberapa defenisi operasional yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Dana perimbangan dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil pajak dan SDA kabupaten/kota dalam waktu 2002-2006 di Sumatera Utara.
- b. PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam waktu 2002-2006

Tehnik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari publikasi resmi institusi yang berhubungan dengan penelitian ini. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pooling data* yaitu menggabungkan data *time series* dengan *cross action data* dari kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif berupa pengolahan data yang diperoleh berdasarkan metoda statistik. Dalam pengolahan data ini digunakan

regresi berganda metoda *Ordinary Least Square* dengan dua variabel endogen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = f(X_1, X_2)$$

Y = PDRB kabupaten kota di Sumatera Utara

X₁ = DBHP

X₂ = SDA

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis, menggunakan software *eviews* versi 3.0. dengan hasil sebagai berikut :

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.990310	0.693218	5.756214	0.0000
LBHPD	1.072434	0.066764	16.06295	0.0000
LSDA	0.001910	0.035381	0.053996	0.9571

Sumber: data olahan

Dengan menghasilkan persamaan ekonometrika sebagai berikut :

$$LPDRB = 3.990310333 + 1.072433692 * LBHPD + 0.001910429366 * LSDA + \mu.$$

Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa variable bagi hasil pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Produk Domestik Regional Bruto kabupaten kota di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari T statistik yang signifikan pada *level of significant* 95%. Sementara variable bagi hasil SDA tidak signifikan dalam mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam kurun waktu 2002-2006.

Hasil ini konsisten dan mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dana bagi hasil pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah. Sementara bagi hasil SDA tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Produk Doestik Regional Bruto suatu daerah.

Hal ini paling tidak dapat dijelaskan dengan asumsi sebagai berikut :

- Pemerintah kabupaten/kota lebih efisien dan terencana dalam menggunakan pendapatan bagi hasil pajak
- Bagi hasil SDA mengalir lebih besar porsinya ke pemerintah pusat daripada ke daerah sendiri.

Disisi lain dapat dilihat perbedaan yang jelas, bahwa bagi hasil pajak yang semakin besar menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas dalam perekonomian daerah yang dalam hal ini adalah PDRB. Sementara bagi hasil SDA merupakan bagi hasil atas sumber daya yang tersedia disuatu daerah yang sifatnya eksplorasi sumber daya, sehingga secara tidak langsung dapat mereduksi sumber-sumber daya dan asset yang ada di daerah. Kerusakan SDA juga menyebabakan kebangkrutan ekonomi dan kemungkinan bencana dari kerusakan sumber daya alam.

Hasil analisis diatas juga menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan bagi hasil pajak sebesar 1% maka PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara akan mengalami kenaikan sebesar 1,073 %. Dan bila terjadi kenaikan bagi hasil SDA sebesar 1%, maka dapat meningkatkan PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar 0,0019%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil uraian dan analisis diatas penulis membuat simpulan sebagai berikut :

- Bagi hasil pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Sumatera Utara sehingga keberadaannya sangat penting bagi perekonomian daerah Sumatera Utara.
- Bagi hasil Sumber Daya Alam tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Sumatera Utara,
- Perluasan pajak dapat dilakukan namun akan lebih efektif bila yang dilakukan adalah intensifikasi peran pajak

Saran

- Fokus pada penerimaan daerah sangat penting bagi pembangunan, namun jauh lebih penting fokus pada pengeluaran, mengedepankan efisensi, efektifitas dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran.
- Penerimaan daerah yang menjadi *input* pembangunan, penggunaannya juga harus dapat dikontrol dari segi *output*, *outcome*, *benefit* dan *impactnya* dalam perekonomian di daerah.
- Pembangunan seharusnya tidak mengabaikan fungsi sosial, etika dan lingkungan sebagai input perekonomian, sehingga pembangunan tidak merusak nilai sosial, etika dan lingkungan.
- Aspek lingkungan penting untuk mendapat prioritas pengaturan, sehingga dicapai pembangunan yang berkelanjutan.
- Melakukan penelitian lanjutan dengan model yang lebih tepat dan rentang waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aschauer, D. A, 2000. *Public Capital and Economic Growth: Issues of Quantity, Finance, and Efficiency*. *Economic Development and Cultural Change* 48 (2): 391-406.
- Aschauer, D. 1989, *Is Government Spending Productive?*, *Journal of Monetary Economics* 23: 177 – 200.

- Brata, Aloysius gunadi, 2004, *komposisi penerimaan sektor publik dan Pertumbuhan ekonomi regional*, lembaga penelitian universitas atma jaya, Yogyakarta
- BPS Sumatera Utara, *Sumatera Utara Dalam Angka (beberapa tahun)*. Medan
- Elmi, Bachrul, 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, UI Press. Jakarta
- Elmi, Bachrul, 2002. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom*. Kajian ekonomi keuangan, vol. 6 no 4. Desember 2002
- Evaluasi pelaksanaan uu nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah* Pusat pengkajian ekonomi dan keuangan badan pengkajian ekonomi, keuangan, dan kerjasama internasional departemen keuangan RI
- Nasution, Chairuddin syah, 2003, *analisis potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (pph) di indonesia periode 1990 – 2000*, kajian ekonomi dan keuangan, vol. 7, no. 2 juni 2003, BAPEKKI, Jakarta
- Purwoko, *Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menarik Investor: Studi Kasus Kabupaten Tanggamus Lampung*, BAPEKKI, Jakarta
- Rappaport, J., 1999. *Local Growth Theory*. CID Working Paper No. 19, Juni 1999.
- Rappaport, J., 1999. *Local Growth Empirics*. CID Working Paper No. 23, Juli 1999.
- Supranto, J. 1995. *Ekonometrik*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Kepmendagri no 29 tahun 2001 *tentang tata cara penyusunan APBD*
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*
- Walpole, R. 1993, *Pengantar Statistika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

LAMPIRAN

Dependent Variable: LPDRB

Method: Least Squares

Date: 11/27/07 Time: 14:20

Sample: 1 80

Included observations: 77

Excluded observations: 3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.990310	0.693218	5.756214	0.0000
LBHPD	1.072434	0.066764	16.06295	0.0000
LSDA	0.001910	0.035381	0.053996	0.9571
R-squared	0.779457	Mean dependent var		14.71108
Adjusted R-squared	0.773497	S.D. dependent var		1.051670
S.E. of regression	0.500514	Akaike info criterion		1.491821
Sum squared resid	18.53809	Schwarz criterion		1.583138
Log likelihood	-54.43511	F-statistic		130.7680
Durbin-Watson stat	1.777497	Prob(F-statistic)		0.000000

Korelasi

	LPDRB	LBHPD	LSDA
LPDRB	1.000000	0.882864	0.102390
LBHPD	0.882864	1.000000	0.112658
LSDA	0.102390	0.112658	1.000000